



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 selesai disusun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, serta memuat rumusan visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan prioritas serta indikator kinerja. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, November 2025



**KETUA BKAD
KAB. TANJUNGPABUNG BARAT,**

AHMAD JAIS, S.E., M.E

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19800701 201001 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	6
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1. GAMBARAN PELAYANAN	6
2.2 KINERJA PELAYANAN SKPD	24
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
BAB III	41
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 TUJUAN RENTRA	41
3.2 SASARAN RENTRA	41
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENTRA	45
BAB IV	48
PRORAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
4.1 RENCANA PROGRAM	51
4.2 RENCANA PENDANAAN	49
4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI	82
4.4 PENYERTAAN MODAL DAERAH	89
BAB V	91
PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) adalah perwujudan dari permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen untuk periode 5 (lima) tahun tahun mendatang.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut BKAD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.

Selain itu urgensi penyusunan Renstra BKAD adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Renja BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
2. Dasar Penilaian Kinerja BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat.

Rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang yang tertuang dalam dokumen Renstra, yang diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2029 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud.

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar Satuan Perangkat Daerah memiliki satu dokumen perencanaan Pembangunan berwawasan 5 Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi. Kebijakan Program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai tugas pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai acuan dalam mengoperasikan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi ;

BAB	I	PENDAHULUAN	
		1.1.	Latar Belakang
		1.2.	Landasan Hukum
		1.3.	Maksud dan Tujuan
		1.4.	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERAGKAT DAERAH	
		2.1	Gambaran Pelayanan
		2.2	Kinerja Pelayanan SKPD
		2.3	Permasalahan dan Isu Strategis
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, STATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	

		3.1	Tujuan Renstra
		3.2	Sasaran Renstra
		3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
BAB	IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BI8DANG URUSAN	
		4.1	Rencana Program
		4.2	Rencana Pendanaan
		4.3	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci
		4.4	Penyertaan Modal Daerah
BAB	V	PENUTUP	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktural Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. Kepala Badan juga bertindak selaku PPKD, BUD dan Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset BMD Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 03 Oktober 2023.

A. Sekretariat:

Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- b. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum, dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, aset, perlengkapan, urusan rumah tangga, kerja sama, hubungan sosial masyarakat, dan kearsipan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian.
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan.
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundanga-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan pengelolaan bmd dan kelengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan pengelolaan BMD.

- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas, dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Anggaran Daerah meliputi: anggaran sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kecamatan. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. penyediaan anggaran kas;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis standar biaya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah membawahi:

1. Subbidang Anggaran I

Subbidang Anggaran I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah. Subbidang Anggaran I dipimpin oleh Kepala Subbidang. Subbidang Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup anggaran urusan pemerintahan

wajib yang terkait pelayanan dasar. Subbidang Anggaran I mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun alokasi anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan lingkup tugas;
- b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. menyusun anggaran belanja daerah;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. membina SKPD dilingkup perencanaan anggaran; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Subbidang Anggaran II

Subbidang Anggaran II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah. Subbidang Anggaran II dipimpin oleh Kepala Subbidang. Subbidang Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup anggaran urusan

pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Subbidang Anggaran II mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun alokasi anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan lingkup tugas;
- b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. menyusun anggaran belanja daerah;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. membina SKPD dilingkup perencanaan anggaran; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang

perbendaharaan daerah meliputi: pengendalian kas daerah, pengelolaan gaji, dan pengelolaan tunjangan. Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- f. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ emotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- h. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- j. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- k. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan Daerah membawai:

1. Sub Bagian Perbendaharaan I

Subbidang Perbendaharaan I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah. Subbidang Perbendaharaan I dipimpin oleh Kepala Subbidang. Subbidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup belanja urusan pemerintahan wajib. Subbidang Perbendaharaan I mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- b. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- c. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- d. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- e. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- f. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggung jawaban pendapatan/ penerimaan kas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- h. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- i. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- j. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- k. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- l. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- m. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- n. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- o. melakukan registrasi SP2D yang telah diterbitkan;
- p. melakukan rekonsiliasi bidang akuntansi dan pelaporan;
- q. melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- r. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;
- s. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah;
- t. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- u. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- v. menyimpan uang daerah;

- w. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- x. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- y. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain;
- z. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; dan
- aa. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Subbidang Perbendaharaan II

Subbidang perbendaharaan II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah. Subbidang Perbendaharaan II dipimpin oleh Kepala Subbidang. Subbidang perbendaharaan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan. Subbidang Perbendaharaan II mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan register SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- b. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- c. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Belanja Langsung;
- d. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- e. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- f. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji;
- g. melakukan pemantauan dan pengurusan Dana DAU dan DAK;
- h. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- i. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- j. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;

- k. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
- l. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan penghapusan, penatausahaan dan pelaporan. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- i. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;

- l. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi:

1. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan

Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lingkup Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas pekerjaan

- a. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- b. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- c. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;
- d. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
- e. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan dipimpin oleh Kepala Subbidang. Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis

dan pemantauan serta evaluasi lingkup Pemindah Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- b. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- c. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
- d. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- i. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- j. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah oleh Kepala Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi meliputi: akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan daerah. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;

- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- h. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- m. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pemeliharaan sistem informasi dan dokumentasi keuangan daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahi:

1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah

Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi lingkup Akuntansi Keuangan Daerah. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
- b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
- c. melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
- d. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;

- e. mengikhtisarkan pengeluaran;
- f. melakukan posting atas realisasi pengeluaran;
- g. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
- h. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD, BOS dan BLUD serta SKPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- i. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
- k. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
- l. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
- m. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah

Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pelaporan keuangan Daerah. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- b. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- c. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- g. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;

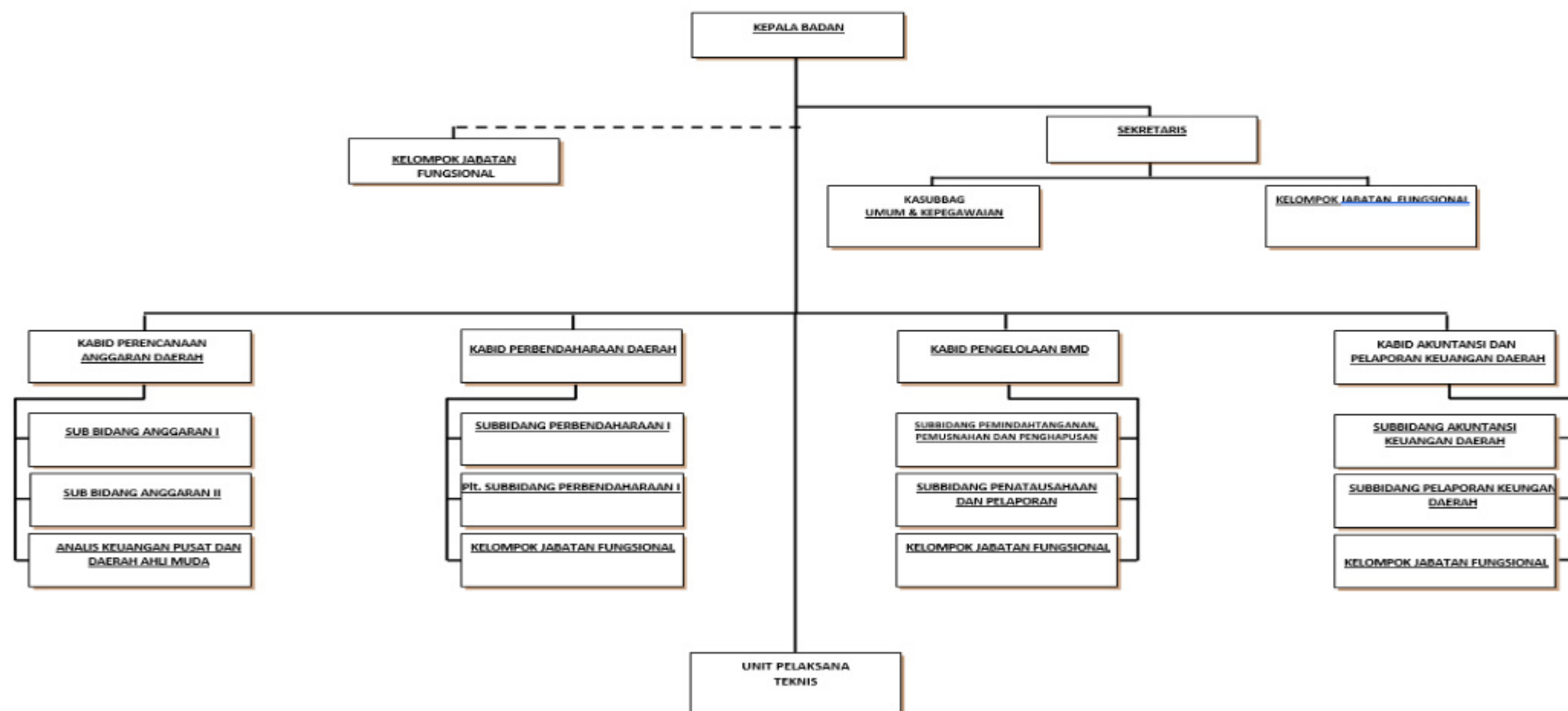
- h. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- l. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- m. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- n. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

F. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

- 1. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Anggaran I;
 - b. Subbidang Anggaran II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan;
 - b. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 - b. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berikut ini data pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan pendidikan.

Dengan sumber daya manusia tersebut di atas, untuk dapat terlaksananya tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, memang dirasakan masih jauh dari memadai. Terlebih diawal pembentukan organisasi ini, sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baru sudah mulai diterapkan. Disamping itu dalam sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah, organisasi ini memegang peranan yang sangat strategis dan vital. Dimana pada awal pengisian personil, segenap komponen organisasi langsung bekerja memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sumber daya manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	5 Orang
3.	Eselon IV	9 Orang
4.	Pejabat Fungsional	6 Orang
5.	Staf PNS dan PPPK	25 Orang
Jumlah		46 Orang

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia berdasarkan status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	42 Orang
2.	PPPK	4 Orang
3.	TKK	43 Orang
Jumlah		89 Orang

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan

No	Kepegawaian	Jumlah
1.	Pembina TK. I	-
2.	Pembina	2 Orang
3.	Penata TK. I	10 Orang
4.	Penata	7 Orang
5.	Penata Muda TK. I	6 Orang
6.	Penata Muda	13 Orang
7.	Pengatur TK. I	4 Orang
8.	Pengatur	-
9.	Pengatur Muda TK. I	-
10.	Pengatur Muda	-
11.	PPPK	4 Orang
12.	TKK	43 Orang
Jumlah		89 Orang

B. Sarana dan Prasarana

a. Gedung

Pada awal pembentukan dan beroperasinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, organisasi ini menempati Lantai 2 gedung Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Jend. Sudirman no. 182 Kuala Tungkal dengan SK Bupati No : 67/Kep.BUP/BPKAD/2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 16 Januari 2017.

Pada tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pindah menempati Lantai 4 Gedung Kantor Bersama dengan

SK Bupati Nomor: 584/Kep.Bup/BKAD/2021 tentang Penunjukan Perangkat Daerah yang Menempati Gedung Kantor Bersama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 Oktober 2023.

b. Barang Inventarisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar masih menggunakan barang inventaris milik setda, namun adapun jenis Barang Inventarisasi BKAD tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.4
Inventarisasi Barang

No	Nama Barang	Jumlah
1	White Board	1 Buah
2	Kursi Besi/Metal	43 Buah
3	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9 Buah
4	Meja 1/2 Biro	41 Buah
5	Kursi Putar	9 Buah
6	P.C Unit	7 Unit
7	Filing Cabinet Kayu	1 Buah
8	Buffet Kayu	1 Buah
9	Alat Penghancur Kertas	6 Buah
10	Mainframe (Komputer Jaringan)	3 Unit
11	Lap Top	30 Unit
12	Camera film	1 Unit
13	Personal Komputer lainnya	36 Unit
14	Hard Disk	3 Unit
15	peralatan mainframe lainnya (dst)	4 Unit
16	Brandkas	1 Unit
17	Unit Power Supply	3 Unit
18	Layar Film/Projector	1 Buah
19	Tablet PC	1 Unit
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43 Unit
21	Stabilisator	4 Unit
22	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit
23	Mesin Absensi	2 Unit
24	Lemari Es	2 Unit
25	Filing Cabinet Besi	1 Unit

26	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1 Unit
27	Handy Talky (HT)	2 Buah
28	A.C. Split	9 Unit
29	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8 Unit
30	Router	4 Buah
31	Hub	2 Buah
32	CCTV - Camera Control Television System	17 Unit
33	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2 Buah
34	Televisi	4 Buah
35	Sound System	1 Set
36	Mimbar/Podium	1 Buah
37	Karpet	6 Buah
38	Gordyin/Kray	3 Paket
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16 Buah
40	External/ Portable Hardisk	1 Buah
41	Peralatan Jaringan lainnya	1 Buah
42	Sofa	4 Buah
43	Tangga Aluminium	1 Buah
44	Meja Tamu Biasa	2 Buah
45	Digital LED Running Text	1 Unit
46	Switcher/Patch Panel	1 Buah
47	Genset	1 Buah
48	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1 Buah
49	Loudspeaker	1 Buah
50	Microphone	10 Buah
51	Mesin Pompa air PMK	1 Unit
52	Bel	1 Unit
53	Sepeda Motor	14 Unit
54	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5 Unit
55	Pick Up	1 Unit
56	Jeep	2 Buah

2.2. Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, diharapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan pelayanan yang

terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan Pengelolaan BMD daerah demi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adapun peningkatan kualitas pelayanan tersebut meliputi :

- 1. Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan urusan penunjang pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
- 2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kinerja pelayanan BKAD Tanjung Jabung Barat dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025. Sesuai dengan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) berdasarkan Renstra BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Terdapat beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja yang rinian sebagai berikut ini.

- 1. Tabel pencapaian kinerja pelayanan BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat.
- 2. Tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.5
Percapaian kinerja pelayanan BKAD

Indikator Kinerja sesuai Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA terhadap APBD	14,8%	14,6%	14,4%	14,2%	14,00%	22,41%	14,8%	19,65%	11,13%	7,06%

Persentase belanja pendidikan (20%)	21,32 %	>20%	>20%	>20%	>20%	20,00	21,32 %	20%	20,87%	21,14%
Persentase belanja kesehatan (10%)	17,61 %	>10%	>10%	>10%	>10%	20,35	17,61 %	20%	17,64%	15,17%
Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,67	12,70	12,76	12,82	12,87	12,19	12,67	11,13	8,16	8,16
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	28,22	28,27	28,34	28,42	28,47	48,01	28,22	51,11	47,83	47,83
Ketepatan Waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai AKIP OPD	64,39 (B)	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)	66,37 (B)	64,39 (B)	67,21 (B)	68,48 (B)	70,15 (BB)
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,39 (B)	83 (B)	84 (B)	85 (B)	86 (B)	82,39 (B)	87 (A)	81,78 (B)	81,10 (B)	81,94 (B)

Penjelasan capaian kinerja pelayanan BKAD

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selama lima tahun terakhir, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Keberhasilan meraih WTP selama lima tahun berturut-turut bukanlah hasil yang instan. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat bersama dengan perangkat daerah lainnya dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menerapkan sistem pengendalian intern yang andal, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pengelolaan keuangan yang baik, opini WTP ini juga menjadi motivasi bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk terus berinovasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

2. Persentase SILPA terhadap APBD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran. Target SILPA dalam periode Renstra secara bertahap diturunkan dari 14,8% pada tahun 2020 menjadi 14,0% pada tahun 2024. Realisasi menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana SILPA menurun signifikan dari 22,41% (2020) menjadi 7,06% (2024). Penurunan ini menggambarkan kemampuan BKAD dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBD, memperkuat perencanaan kas, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program semakin terintegrasi antara OPD dan BKAD.

3. Persentase Belanja Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan prioritas utama dalam kebijakan fiskal daerah. BKAD memastikan bahwa porsi belanja untuk pendidikan selalu di atas 20% dari total APBD, sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Selama 2020–2024, realisasi belanja pendidikan tercatat antara 20% hingga 21,32%, menunjukkan konsistensi dukungan terhadap peningkatan mutu dan pemerataan layanan

pendidikan. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung program peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

4. Persentase Belanja Kesehatan

Kinerja pengelolaan belanja kesehatan juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Target minimal belanja kesehatan sebesar 10% dari APBD berhasil dipenuhi secara konsisten. Pada tahun 2020 realisasi mencapai 20,35%, dan meskipun mengalami fluktuasi hingga 15,17% di tahun 2024, proporsinya tetap di atas standar minimal nasional. Fluktuasi ini lebih banyak disebabkan oleh perubahan kebijakan belanja yang diarahkan untuk penanganan pandemi pada tahun-tahun awal periode Renstra dan penyesuaian kembali pasca-pandemi. Namun demikian, capaian tersebut tetap menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

5. Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Salah satu capaian penting BKAD adalah ketepatan waktu penetapan APBD. Dari tahun 2021 hingga 2024, penetapan APBD selalu dilakukan tepat waktu. Hanya pada tahun 2020 terjadi keterlambatan akibat kondisi khusus dan penyesuaian regulasi fiskal di masa awal pandemi. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penetapan APBD menunjukkan kemampuan BKAD menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta koordinasi yang baik dengan DPRD dan perangkat daerah lainnya. Disiplin fiskal ini merupakan dasar penting bagi pelaksanaan program pembangunan daerah yang terencana dan terukur.

6. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Efisiensi belanja aparatur menjadi fokus penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Target rasio belanja pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) meningkat tipis dari 12,67% pada 2020 menjadi 12,87% pada 2024, namun realisasi menunjukkan tren penurunan signifikan — dari 12,19% (2020) menjadi 8,16% (2024). Penurunan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan rasionalisasi belanja aparatur dan mengalihkan anggaran ke belanja produktif. Hal ini memperlihatkan upaya nyata dalam memperkuat struktur belanja daerah agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

7. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum

Rasio belanja untuk urusan pemerintahan umum sempat tinggi pada awal periode, yaitu 48,01% pada 2020 dan 51,11% pada 2022, namun berhasil ditekan menjadi 47,83% pada 2023 dan 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengarahkan belanja pada sektor yang lebih produktif

dan langsung berdampak pada masyarakat. BKAD terus melakukan rasionalisasi belanja administratif, menekan pengeluaran yang kurang prioritas, dan memperkuat efisiensi birokrasi dalam pengelolaan APBD.

8. Ketersediaan Kas/Dana Tepat Waktu

Selama periode 2020–2024, BKAD berhasil menjaga ketersediaan kas sebesar 100% setiap tahun. Hal ini mencerminkan kemampuan manajemen kas daerah yang baik, memastikan likuiditas anggaran terjaga, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program kegiatan seluruh perangkat daerah tanpa kendala keuangan.

9. Sinkronisasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)

BKAD juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam sinkronisasi laporan keuangan antar-OPD dengan laporan keuangan daerah (LKD). Selama lima tahun terakhir, tingkat sinkronisasi laporan keuangan dan aset mencapai 100% setiap tahun. Capaian ini menunjukkan keberhasilan BKAD dalam menerapkan sistem pelaporan yang terintegrasi, memperkuat akurasi data aset, dan meningkatkan transparansi pengelolaan barang milik daerah (BMD).

10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai AKIP BKAD terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 64,39 (kategori B) pada 2020 menjadi 70,15 (kategori BB) pada 2024. Peningkatan nilai AKIP ini menggambarkan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja instansi. Perbaikan sistem akuntabilitas ini merupakan hasil dari penerapan manajemen berbasis kinerja, penguatan sistem evaluasi internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BKAD.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKAD juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020 nilai IKM sebesar 82,39 (kategori Baik), kemudian meningkat hingga mencapai 87 (kategori A) pada tahun 2021, dan bertahan di kisaran 81–82 (kategori Baik) hingga 2024. Nilai IKM yang stabil tinggi menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan BKAD—baik dalam pengelolaan keuangan, aset, maupun pelayanan administrasi—telah dilaksanakan dengan cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Secara keseluruhan, kinerja BKAD selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola keuangan daerah. BKAD mampu mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut, menurunkan SILPA secara konsisten, menjaga efisiensi belanja aparatur, serta meningkatkan

akuntabilitas kinerja dan kepuasan masyarakat. Pencapaian ini juga tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengawasan internal yang kuat, serta dukungan dari pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	9.559.518.344	11.720.039.961	12.272.823.655	11.427.795.828	8.760.157.154	10.622.584.895	11.452.508.823	10.153.524.692
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.574.750	119.574.600	151.374.500	155.835.000	117.625.750	118.175.500	150.221.700	144.031.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.375.000	47.375.000	57.274.900	92.265.000	47.125.000	47.110.000	56.837.000	84.034.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.199.750	72.199.600	94.099.600	63.570.000	70.500.750	71.065.500	93.384.700	59.996.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.569.890.151	6.569.975.736	6.695.547.505	6.068.146.578	6.165.127.127	5.869.776.248	6.290.940.618	5.599.332.109
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.880.790.151	5.952.275.736	5.864.947.505	5.158.582.578	5.484.227.127	5.255.376.248	5.478.744.718	4.704.220.609
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	689.100.000	617.700.000	810.200.000	850.228.000	680.900.000	614.400.000	810.200.000	840.311.500
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	20.400.000	59.336.000	-	-	1.995.900	54.800.000
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	69.190.900	-	-	55.309.000	69.065.000	-	-	51.311.500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	69.190.900	-	-	-	69.065.000	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	26.378.000	-	-	-	25.200.000
Pengamanan Barnag Milik Daerah SKPD	-	-	-	28.931.000	-	-	-	26.111.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.175.000	143.150.000	176.750.000	72.600.000	77.300.000	141.130.000	175.280.000	70.300.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.175.000	143.150.000	176.750.000	72.600.000	77.300.000	141.130.000	175.280.000	70.300.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.305.922.398	1.555.207.355	1.461.261.450	1.666.870.250	1.053.236.189	1.416.791.560	1.271.771.705	1.419.139.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.391.569	27.587.309	11.279.000	215.649.500	7.851.244	25.460.705	7.090.000	199.045.669
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.185.249	272.597.856	210.452.000	218.863.000	195.910.825	270.124.650	209.349.500	199.812.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.800.000	130.250.000	86.200.000	166.900.000	96.815.000	95.191.000	43.988.800	120.279.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.885.580	67.968.440	46.051.800	54.629.200	25.814.830	66.985.800	32.070.500	20.030.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.300.000	34.300.000	38.175.000	47.925.000	22.585.000	28.235.000	29.690.000	38.260.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	936.360.000	967.303.750	989.903.650	911.075.550	704.259.290	875.954.405	874.582.905	791.692.531
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	55.200.000	79.200.000	51.828.000	-	54.840.000	75.000.000	50.019.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.130.955.482	1.974.642.270	2.370.222.000	1.739.056.000	1.087.432.095	1.909.259.598	2.343.460.346	1.644.696.500
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1.240.000.000	1.968.610.000	1.091.541.000	-	1.212.950.000	1.948.490.346	999.577.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.130.955.482	734.642.270	401.612.000	647.515.000	1.087.432.095	696.309.598	394.970.000	645.119.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.789.663	966.120.000	948.030.000	1.022.245.000	64.176.800	879.233.908	897.121.691	753.419.124
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.860.000	5.120.000	4.660.000	46.680.000	4.250.800	2.900.100	3.600.000	44.045.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	401.250.000	517.748.000	766.400.000	-	325.833.808	486.731.691	521.032.124
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.929.663	559.750.000	425.622.000	209.165.000	59.926.000	550.500.000	406.790.000	188.342.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.020.000	391.370.000	469.638.200	647.734.000	126.194.193	288.218.081	323.712.763	471.294.559
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.720.000	230.400.000	270.018.200	423.454.000	113.705.716	189.695.097	196.362.713	320.796.459
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.300.000	160.970.000	160.320.000	203.320.000	12.488.477	98.522.984	91.250.050	129.663.100
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	39.300.000	20.960.000	-	-	36.100.000	20.835.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	208.176.065.795	220.067.871.273	215.740.156.762	2.826.991.600	203.885.132.721	204.238.761.868	210.254.161.562	258.677.661.864
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.582.532.728	1.699.017.155	1.795.940.500	2.029.360.600	1.219.548.500	1.469.712.500	1.511.177.500	1.693.160.351
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	215.780.270	224.238.000	246.078.000	246.557.600	96.948.000	167.601.000	153.932.500	153.411.950
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	215.822.680	252.260.000	274.480.000	274.960.000	104.075.000	177.065.000	164.995.000	166.840.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	806.553.278	816.114.155	848.012.500	942.548.000	723.390.500	735.148.500	781.600.000	866.647.401
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	214.366.750	253.955.000	259.050.000	275.239.000	168.635.000	250.673.000	242.349.000	224.180.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	130.009.750	152.450.000	168.320.000	290.056.000	126.500.000	139.225.000	168.301.000	282.081.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	514.103.550	635.395.534	521.248.100	497.516.000	497.433.750	428.002.600	466.549.900	527.329.000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	161.550.000	177.300.000	201.250.000	220.650.000	161.275.000	176.400.000	193.792.000	208.007.000

Penyiapan. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	70.127.300	96.789.400	86.670.100	122.870.000	55.659.000	67.734.600	72.229.900	115.995.000
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	74.902.000	73.855.134	65.976.000	27.120.000	74.100.000	25.250.000	39.730.000	27.090.000
Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	94.800.000	172.630.000	-	74.076.000	94.412.000	48.000.000	-	70.500.000
Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. laporan aliran kas. dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	-	-	56.052.000	-	-	-	52.000.000	-
Koordinasi. pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	56.299.750	71.045.000	49.800.000	52.800.000	55.811.750	68.218.000	49.798.000	47.650.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	56.424.500	43.776.000	61.500.000	64.535.000	56.176.000	42.400.000	59.000.000	58.087.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	459.410.000	481.634.800	554.230.000	550.340.000	454.885.000	463.809.400	533.830.000	530.094.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO dan Beban	113.100.000	113.100.000	113.004.000	165.200.000	112.100.000	113.100.000	113.004.000	162.200.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	102.610.000	102.610.000	133.874.000	149.560.000	102.335.000	102.610.000	133.874.000	149.560.000

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	243.700.000	265.924.800	307.352.000	235.580.000	240.450.000	248.099.400	286.952.000	218.334.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	205.620.019.517	217.251.823.784	212.868.738.162	273.111.771.513	201.713.265.471	201.877.237.368	207.742.604.162	255.927.078.513
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	198.119.510.831	194.025.691.600	204.497.681.885	260.320.792.100	198.096.133.521	194.025.691.600	204.497.681.885	252.340.792.100
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.888.376.736	20.106.662.535	5.126.134.000	9.204.693.000	5.000.000	4.732.076.119	-	-
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.612.131.950	3.119.469.649	3.244.922.277	3.586.286.413	3.612.131.950	3.119.469.649	3.244.922.277	3.586.286.413
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.221.432.900	1.698.102.300	1.713.350.000	1.224.440.000	1.811.831.669	1.547.929.425	1.250.871.248	-
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.221.432.900	1.698.102.300	1.713.350.000	1.224.440.000	1.811.831.669	1.547.929.425	1.250.871.248	-
Penyusunan Standar Harga	84.650.000	176.500.000	179.100.000	211.550.000	84.575.000	169.172.500	128.700.000	171.795.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	28.290.000	36.000.000	-	-	27.690.000	-
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	521.866.400	-	-	-	270.379.000	-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	167.750.000	401.100.000	178.440.000	596.990.000	162.650.000	389.050.000	178.440.000	546.870.250
Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	-	73.260.000	-	-	-	28.800.000	64.791.200
Pengamanan Barang Milik Daerah	-	270.600.000	822.540.000	100.000.000	-	196.407.400	581.223.784	204.337.100
Penilaian Barang Milik Daerah	-	15.166.300	60.350.000	279.900.000	-	10.166.300	59.199.000	-
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	203.166.500	-	-	-	179.780.600	-	-	-
Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.244.000.000	717.496.000	164.780.000	174.760.000	1.114.447.069	666.300.725	130.442.464	139.498.784

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	117.240.000	136.230.000	106.095.000	-	116.832.500	71.780.000	80.430.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	70.360.000	53.000.000	-		44.596.000	43.090.000

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan (BKAD)

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain:

- a. Belum optimalnya perencanaan keuangan terkait kualitas tata kelola pelayanan Badan keuangan dan aset daerah
- b. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
- c. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset-asset daerah, yang mana saat ini

masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum diketemukan.

- d. Data barang milik daerah (BMD) kurang akurat dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Barat terdapat beberapa barang milik daerah masih ada dalam penelusuran.

Apabila dievaluasi lebih jauh, bahwa 4 (Empat) permasalahan pokok sebagaimana diatas disebabkan karena:

1. Pengembangan teknologi untuk belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
2. Kurangnya jumlah personil dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ASN yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT
3. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implemetasi masih rendah.
4. Masih Lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan sebagaimana dimaksud diatas ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja BKAD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

- a. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan keuangan dan aset daerah. Akselerasi penyesuaian dokumen perencanaan keuangan dan aset daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengimplementasikan kebijakan kebijakan baru baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh BKAD
- b. Kuantitas dan kualitas SDM BKAD sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan. Dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka secara kuantitas SDM BKAD kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kurang.
- c. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik ditingkat kabupaten, kali bersifat parsial, sehingga perencanaan keuangan dan aset daerah seringkali masih belum selaras dan konsisten Inskonsistensi kebijakan masih sering terjadi.

Tabel 2.7
Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Aplikasi SIPD yang belum maksimal dan keterbatasan kemampuan sumber keuangan dalam memenuhi pagu OPD	Belum optimalnya perencanaan keuangan terkait kualitas tata kelola pelayanan Badan keuangan dan aset daerah.	Pengembangan teknologi untuk belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
		Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/ kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;	Kurangnya jumlah personil dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ASN yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT
		Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset-asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum diketemukan.	Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implemetasi masih rendah.
		Data barang milik daerah (BMD) kurang akurat dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Barat terdapat beberapa	Masih Lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

		barang milik daerah masih ada dalam penuluruhan.	
--	--	--	--

2.3.2. Isu Strategis.

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus diperhatikan berdasarkan tupoksi BKAD adalah :

- a. Aplikasi SIPD yang belum maksimal dan keterbatasan kemampuan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pagu OPD
- b. Sering terjadi perubahan regulasi kebijakan dan perundang-undangan dari pusat
- c. Terdapat aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah jalan (fasilitas umum) yang belum memiliki legalitas hukum (Sertifikat)
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset dalam meningkatkan pendapatan daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dengan mempedomani Tujuan dari Misi ke 2 (Dua) dan ke 3 (Tiga) Bupati dan wakil Bupati terpilih pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu **“Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik”** dan **“Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan”** untuk mencapai tujuan **“Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”** maka dengan demikian pengelolaan keuangan dan aset Daerah ke depannya adalah sebagai salah satu pendukung utama dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintahan untuk mencapai Sasaran RPJMD **“Meningkatnya Kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”** dengan Indikator **Nilai Opini BPK terhadap laporan Keuangan** yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan visi dan misi adalah Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

3.2. SASARAN RENSTRA

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan Daerah
2. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Dengan Indikator sasaran :

- 1) Ketepatan Waktu penetapan APBD
- 2) Ketersediaan Kas / Dana tepat waktu.
- 3) Persentase Hasil Sinkronisasi Laporan Keuangan OPD terhadap LKD
- 4) Persentase Hasil Sinkronisasi Aset OPD terhadap BMD
- 5) Nilai AKIP OPD.
- 6) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Sasaran Renstra BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH yang akan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 3.1

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja Pengelolaan keuangan Daerah	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
			Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Pengelolaan Aset Daerah.	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82 (B)	83 (B)	84 (B)	85 (B)	86 (B)	87 (B)	

3.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Bab ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan.

Seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab III, bahwa untuk mencapai tujuan di Misi 2 (dua) dan misi 3 (tiga) RPJMD, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten tanjung Jabung barat menetapkan 2 sasaran. Untuk mewujudkan kedua sasaran tersebut, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan hubungan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

3.3.1. Strategi

Strategi adalah tahap akhir dari perencanaan strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line terbawah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dengan melakukan strategi tertentu untuk mencapainya.

Strategi yang akan ditempuh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat dalam mencapai visi, misi dan sasaran :

1. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja;
2. Perluasan akses layanan keuangan formal bagi Masyarakat;
3. Penguatan literasi dan inklusi keuangan;
4. Fasilitasi kemitraan perbankan dan lembaga keuangan;

3.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025-2030, maka rencana Kebijakan yang akan dilakukan dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
MISI 2 : Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik			
MISI 3 : Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset Daerah	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja	1. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 2. Peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja dan perjanjian kinerja 3. Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 4. Penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi 5. Penguatan peran Bappeda dan Inspektorat dalam perencanaan dan pengawasan kinerja

		Perluasan akses layanan keuangan formal bagi Masyarakat	1. Mendorong pembukaan kantor cabang, unit layanan, atau agen bank di wilayah yang belum terjangkau 2. Mengembangkan layanan keuangan berbasis digital dan mobile banking
		Penguatan literasi dan inklusi keuangan	1. Mengadakan kampanye inklusi keuangan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas 2. Mengoptimalkan peran perbankan, dan lembaga keuangan lainnya dalam program
		Fasilitasi kemitraan perbankan dan lembaga keuangan	1. Menyusun program kredit/pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan karakteristik usaha daerah. 2. Mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan inklusif, termasuk kredit tanpa agunan untuk usaha mikro 3. Mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha daerah dengan lembaga keuangan berbasis syariah untuk mendukung ekonomi halal.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. RENCANA PROGRAM

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Yang mana program, kegiatan dan sub kegiatan pada BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat telah diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2025-2029, dan telah diverifikasi dengan kesepakatan Berita Acara forum OPD yang telah dilaksanakan tanggal 07 Juni 2025 yang mana terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 62 sub kegiatan serta pendanaan dapat diurikan sebagai berikut :

a. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Aset Daerah

b. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
8. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
18. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
29. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
32. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
33. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
34. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

35. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
36. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
37. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
38. Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga
39. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
40. Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
41. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
42. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
43. Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
44. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
45. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
46. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
47. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
48. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
49. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
50. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
51. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
52. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
53. Penyusunan Standar Harga
54. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

55. Penatausahaan Barang Milik Daerah
56. Inventarisasi Barang Milik Daerah
57. Pengamanan Barang Milik Daerah
58. Penilaian Barang Milik Daerah
59. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

4.2. RENCANA PENDANAAN

Rencana pendanaan yang tertuang pada RPJMD tahun 2025-2030 pada periode 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Tahun 2025 = Rp. 299.722.182.261
2. Tahun 2026 = Rp. 333.765.067.606
3. Tahun 2027 = Rp. 352.778.102.830
4. Tahun 2028 = Rp. 362.788.995.501
5. Tahun 2029 = Rp. 367.865.296.225
6. Tahun 2030 = Rp. 367.865.296.225

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP OPD (*)		
					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.02.01.2.02.0008 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Disiplin Aparatur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah			Ketepatan waktu penetapan APBD (Tepat Waktu) Ketersediaan kas/dana tepat waktu (%) Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD (%)		
			Meningkatnya tata kelola anggaran		Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
				Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah			Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap Aset OPD (%)		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap Aset OPD (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02 - KEUANGAN				289.722.182.281,00		333.795.087.806,00		362.778.102.830,00		382.788.995.501,00		387.885.298.225,00		387.885.298.225,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor		100%	12.430.332.720	100%	16.841.764.519	100%	18.333.764.519	100%	18.315.764.519	100%	17.307.764.519	100%	17.307.764.519	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD	100	100	12.430.332.720	100	16.841.764.519	100	18.333.764.519	100	18.315.764.519	100	17.307.764.519	100	17.307.764.519	
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM	100	100		100		100		100		100		100		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.370.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lkip yang disusun dan dilaporkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	19.370.000	8 Dokumen	45.000.000	8 Dokumen	45.000.000	8 Dokumen	45.000.000	8 Dokumen	45.000.000	8 Dokumen	45.000.000	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.530.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	11.530.000	9 Dokumen	25.000.000	9 Dokumen	25.000.000	9 Dokumen	25.000.000	9 Dokumen	25.000.000	9 Dokumen	25.000.000	
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.340.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	8 Laporan	8.340.000	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	20.000.000	
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	8.167.600.420	100%	3.119.554.519	100%	3.338.554.519	100%	3.659.554.519	100%	3.778.554.519	100%	3.778.554.519	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	41 Orang/Bulan	8.167.600.420	60 Orang/Bulan	3.119.664.519	66 Orang/Bulan	3.339.664.519	80 Orang/Bulan	3.659.664.519	86 Orang/Bulan	3.779.664.519	86 Orang/Bulan	3.779.664.519	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.194.664.420		7.076.718.519		7.276.718.519		7.476.718.519		7.676.718.519		7.676.718.519	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	41 Orang/Bulan	5.194.664.420	60 Orang/Bulan	7.076.718.519	66 Orang/Bulan	7.276.718.519	80 Orang/Bulan	7.476.718.519	86 Orang/Bulan	7.676.718.519	86 Orang/Bulan	7.676.718.519	
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				840.736.000		920.736.000		940.736.000		960.736.000		980.736.000		980.736.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	840.736.000	12 Dokumen	920.736.000	12 Dokumen	940.736.000	12 Dokumen	960.736.000	12 Dokumen	980.736.000	12 Dokumen	980.736.000	
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen	36.000.000	12 Dokumen	36.000.000	12 Dokumen	36.000.000	12 Dokumen	36.000.000	12 Dokumen	36.000.000	12 Dokumen	36.000.000	
5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				86.100.000		86.100.000		86.100.000		86.100.000		86.100.000		86.100.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	86.100.000	2 Dokumen	86.100.000	2 Dokumen	86.100.000	2 Dokumen	86.100.000	2 Dokumen	86.100.000	2 Dokumen	86.100.000	
6.02.01.2.05 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	100%	72.600.000	100%	72.600.000	100%	72.600.000	100%	72.600.000	100%	72.600.000	100%	72.600.000	
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	72.600.000	2 Dokumen	72.600.000	2 Dokumen	72.600.000	2 Dokumen	72.600.000	2 Dokumen	72.600.000	2 Dokumen	72.600.000	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				35.500.000		35.500.000		35.500.000		35.500.000		35.500.000		35.500.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	35.500.000	2 Dokumen	35.500.000	2 Dokumen	35.500.000	2 Dokumen	35.500.000	2 Dokumen	35.500.000	2 Dokumen	35.500.000	
5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	7 Dokumen	37.000.000	7 Dokumen	37.000.000	7 Dokumen	37.000.000	7 Dokumen	37.000.000	7 Dokumen	37.000.000	7 Dokumen	37.000.000	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	128.800.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	270.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Stel	128.800.000	90 Stel	260.000.000	100 Stel	280.000.000	105 Stel	270.000.000	108 Stel	280.000.000	108 Stel	280.000.000	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				79.600.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		230.000.000	
Tersedianya Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Stel	79.600.000	90 Stel	200.000.000	100 Stel	210.000.000	105 Stel	220.000.000	108 Stel	230.000.000	108 Stel	230.000.000	
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	
5.02.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.638.186.400	100%	1.808.700.000	100%	1.711.700.000	100%	1.815.700.000	100%	1.816.700.000	100%	1.816.700.000	
Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.638.186.400	2 Paket	1.808.700.000	4 Paket	1.711.700.000	4 Paket	1.815.700.000	4 Paket	1.816.700.000	4 Paket	1.816.700.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket		4 Paket		7 Paket		7 Paket		7 Paket		7 Paket		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		2 Paket		18 Paket		18 Paket		18 Paket		18 Paket		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		
	Jumlah Dokumen Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen				
	Jumla Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 3KPD	441 Laporan	200 Laporan		200 Laporan		400 Laporan		400 Laporan		470 Laporan		470 Laporan		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada 3KPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.889.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.889.000	2 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000	
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				215.675.000		220.500.000		220.500.000		220.500.000		220.500.000		220.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	215.675.000	4 Paket	220.500.000	7 Paket	220.500.000	7 Paket	220.500.000	7 Paket	220.500.000	7 Paket	220.500.000	
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	75.000.000	2 Paket	80.000.000	18 Paket	80.000.000	18 Paket	80.000.000	18 Paket	80.000.000	18 Paket	80.000.000	
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				43.058.400		50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		53.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.058.400	1 Paket	50.000.000	3 Paket	51.000.000	3 Paket	52.000.000	3 Paket	53.000.000	3 Paket	53.000.000	
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				48.225.000		50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		53.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	48.225.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	51.000.000	12 Dokumen	52.000.000	12 Dokumen	53.000.000	12 Dokumen	53.000.000	
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.051.138.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441 Laporan	200 Laporan	1.051.138.000	200 Laporan	1.100.000.000	400 Laporan	1.200.000.000	450 Laporan	1.300.000.000	470 Laporan	1.400.000.000	470 Laporan	1.400.000.000	
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				79.200.000		79.200.000		79.200.000		79.200.000		79.200.000		79.200.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	79.200.000	12 Dokumen	79.200.000	12 Dokumen	79.200.000	12 Dokumen	79.200.000	12 Dokumen	79.200.000	12 Dokumen	79.200.000	
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.911.000.000	100%	2.800.000.000	100%	2.820.000.000	100%	2.840.000.000	100%	2.860.000.000	100%	2.880.000.000	
Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	1.911.000.000	2 Unit	2.800.000.000	2 Unit	2.820.000.000	2 Unit	2.840.000.000	2 Unit	2.860.000.000	2 Unit	2.880.000.000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	10 Unit		16 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit				
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				750.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	750.000.000	2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				161.000.000		300.000.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000		360.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	10 Unit	161.000.000	15 Unit	300.000.000	20 Unit	320.000.000	20 Unit	340.000.000	20 Unit	360.000.000	20 Unit	360.000.000	
5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	
6.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.108.912.000	100%	2.276.000.000	100%	2.386.000.000	100%	2.606.000.000	100%	2.826.000.000	100%	2.826.000.000	
Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	12 Laporan	2.108.912.000	12 Laporan	2.276.000.000	12 Laporan	2.386.000.000	12 Laporan	2.606.000.000	12 Laporan	2.826.000.000	12 Laporan	2.826.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Dokumen	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				18.740.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	12 Laporan	18.740.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				507.968.000		550.000.000		570.000.000		580.000.000		600.000.000		600.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Dokumen	12 Laporan	507.968.000	12 Laporan	550.000.000	12 Laporan	570.000.000	12 Laporan	580.000.000	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	600.000.000	
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.582.204.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	1.582.204.000	12 Laporan	1.700.000.000	12 Laporan	1.800.000.000	12 Laporan	1.900.000.000	12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.000.000.000	
6.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	481.784.800	100%	870.000.000	100%	880.000.000	100%	710.000.000	100%	730.000.000	100%	730.000.000	
Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	481.784.800	26 Unit	870.000.000	26 Unit	880.000.000	26 Unit	710.000.000	26 Unit	730.000.000	26 Unit	730.000.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 unit	80 Unit		80 Unit		80 Unit		80 Unit		80 Unit				

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			1 Unit			1 Unit		1 Unit		1 Unit		
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				290.000.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000		380.000.000		380.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	290.000.000	25 Unit	320.000.000	25 Unit	340.000.000	25 Unit	360.000.000	25 Unit	380.000.000	25 Unit	380.000.000	
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				166.670.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 unit	90 Unit	166.670.000	90 Unit	200.000.000	90 Unit	200.000.000	90 Unit	200.000.000	90 Unit	200.000.000	90 Unit	200.000.000	
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.094.900		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	35.094.900	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	
6.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				286.348.478.933		316.383.366.687		333.777.248.311		343.172.648.882		347.688.441.708		347.688.441.708	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	286.348.478.933	100%	316.383.366.687	100%	333.777.248.311	100%	343.172.648.882	100%	347.688.441.708	100%	347.688.441.708	
6.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	100%	1.997.621.288	100%	2.021.222.378	100%	2.021.222.378	100%	2.021.222.378	100%	2.021.222.378	100%	2.021.222.378	
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPA3 yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.997.621.288	2 Dokumen	2.021.222.378	2 Dokumen	2.021.222.378	2 Dokumen	2.021.222.378	2 Dokumen	2.021.222.378	2 Dokumen	2.021.222.378	
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPA3 yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen						
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen						

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	2 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				262.282.266		275.396.379		275.396.379		275.396.379		275.396.379		275.396.379	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	262.282.266	2 Dokumen	275.396.379	2 Dokumen	275.396.379	2 Dokumen	275.396.379	2 Dokumen	275.396.379	2 Dokumen	275.396.379	
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				280.000.000		282.000.000		282.000.000		282.000.000		282.000.000		282.000.000	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	280.000.000	2 Dokumen	282.000.000	2 Dokumen	282.000.000	2 Dokumen	282.000.000	2 Dokumen	282.000.000	2 Dokumen	282.000.000	
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				970.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	970.000.000	2 Dokumen	975.000.000	2 Dokumen	975.000.000	2 Dokumen	975.000.000	2 Dokumen	975.000.000	2 Dokumen	975.000.000	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				285.239.000		288.826.000		288.826.000		288.826.000		288.826.000		288.826.000	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	4 Dokumen	285.239.000	4 Dokumen	288.826.000	4 Dokumen	288.826.000	4 Dokumen	288.826.000	4 Dokumen	288.826.000	4 Dokumen	288.826.000	
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	
6.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			100%	1.028.984.841	100%	1.039.454.434	100%	1.196.348.800	100%	1.361.284.788	100%	1.602.178.832	100%	1.602.178.832	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen	1.028.894.841	628 Dokumen	1.039.434.434	628 Dokumen	1.186.348.800	628 Dokumen	1.361.284.788	628 Dokumen	1.602.179.832	628 Dokumen	1.602.179.832	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	44 Laporan		44 Laporan		44 Laporan		44 Laporan		44 Laporan		44 Laporan		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	44 Dokumen		178 Dokumen		178 Dokumen		178 Dokumen		178 Dokumen		178 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaran Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi	44 Dokumen	44 Dokumen		18 Dokumen		18 Dokumen		18 Dokumen		18 Dokumen		18 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi	44 Dokumen	44 Dokumen		628 Dokumen		628 Dokumen		628 Dokumen		628 Dokumen		628 Dokumen		
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	44 Laporan	44 Laporan		628 Laporan		628 Laporan		628 Laporan		628 Laporan		628 Laporan		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul	-	44 Dokumen		44 Dokumen		44 Dokumen		44 Dokumen		44 Dokumen		44 Dokumen		
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	44 Dokumen	44 Dokumen		628 Dokumen		628 Dokumen		628 Dokumen		628 Dokumen		628 Dokumen		
	Jumlah Petunjuk Teknik Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	-	44 Dokumen		44 Dokumen		44 Dokumen		44 Dokumen		44 Dokumen		44 Dokumen		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	-	44 Orang		44 Orang		44 Orang		44 Orang		44 Orang		44 Orang		
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				252.691.230		254.321.496		292.469.720		330.617.944		368.766.168		368.766.168	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen	252.691.230	528 Dokumen	254.321.496,00	528 Dokumen	292.469.720,00	528 Dokumen	330.617.944,00	528 Dokumen	368.766.168,00	528 Dokumen	368.766.168,00	
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				37.116.765		37.356.228		42.959.662		48.563.096		54.166.530		54.166.530	
Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	44 Laporan	37.116.765	44 Laporan	37.356.228,00	528 Dokumen	42.959.662,00	44 Laporan	48.563.096,00	44 Laporan	54.166.530,00	44 Laporan	54.166.530,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02.2.02.0003 - Penyisipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				250.000.000		250.000.000		287.500.000		325.000.000		362.500.000		362.500.000	
Terlaksananya Penyisipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	44 Dokumen	250.000.000	176 Dokumen	250.000.000,00	4 Laporan	287.500.000,00	176 Dokumen	325.000.000,00	176 Dokumen	362.500.000,00	176 Dokumen	362.500.000,00	
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembayaan Daerah				38.736.000		40.947.000		47.089.050		53.231.100		59.373.150		59.373.150	
Terlaksananya Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen	38.736.000	4 Dokumen	40.947.000,00	1 Dokumen	47.089.050,00	4 Dokumen	53.231.100,00	4 Dokumen	59.373.150,00	4 Dokumen	59.373.150,00	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				113.392.125		116.390.925		133.849.564		151.308.203		168.766.842		168.766.842	
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	44 Dokumen	44 Dokumen	113.392.125	16 Dokumen	116.390.925,00	1 Dokumen	133.849.564,00	16 Dokumen	151.308.203,00	16 Dokumen	168.766.842,00	16 Dokumen	168.766.842,00	
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank				76.967.388		77.463.951		89.083.544		100.703.137		112.322.730		112.322.730	
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	44 Dokumen	44 Dokumen	76.967.388	528 Dokumen	77.463.951,00	88 Orang	89.083.544,00	528 Dokumen	100.703.137,00	528 Dokumen	112.322.730,00	528 Dokumen	112.322.730,00	
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PPK)				71.289.422		71.749.353		82.511.756		93.274.159		104.036.562		104.036.562	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	44 Laporan	44 Laporan	71.289.422	528 Laporan	71.749.353,00	528 Laporan	82.511.756,00	528 Laporan	93.274.159,00	528 Laporan	104.036.562,00	528 Laporan	104.036.562,00	
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				30.434.963		30.631.317		35.226.015		39.820.713		44.415.411		44.415.411	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	44 Dokumen	30.434.963	44 Dokumen	30.631.317,00	44 Dokumen	35.226.015,00	44 Dokumen	39.820.713,00	44 Dokumen	44.415.411,00	44 Dokumen	44.415.411,00	
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				77.269.648		78.269.684		90.010.137		101.750.590		113.491.043		113.491.043	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	44 Dokumen	44 Dokumen	77.269.648	528 Dokumen	78.269.684,00	528 Dokumen	90.010.137,00	528 Dokumen	101.750.590,00	528 Dokumen	113.491.043,00	528 Dokumen	113.491.043,00	
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan				32.097.400		32.304.480		37.150.152		41.995.824		46.841.496		46.841.496	
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	44 Dokumen	32.097.400	44 Dokumen	32.304.480,00	44 Dokumen	37.150.152,00	44 Dokumen	41.995.824,00	44 Dokumen	46.841.496,00	44 Dokumen	46.841.496,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		57.500.000		65.000.000		67.500.000		67.500.000	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	44 Orang	50.000.000	44 Orang	50.000.000,00	44 Orang	57.500.000,00	44 Orang	65.000.000,00	44 Orang	67.500.000,00	44 Orang	67.500.000,00	
6.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100%	1.272.130.406	100%	1.339.882.220	100%	1.454.842.746	100%	1.630.883.217	100%	1.830.361.742	100%	1.830.361.742	
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	24 Dokumen	24 Dokumen	1.272.130.406	528 Dokumen	1.339.882.220	528 Dokumen	1.454.842.746	528 Dokumen	1.630.883.217	528 Dokumen	1.830.361.742	528 Dokumen	1.830.361.742	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	-	88 Orang		88 Orang		88 Orang		88 Orang		88 Orang		88 Orang		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				215.105.880		236.616.468		272.108.938		307.601.408		343.093.878		343.093.878	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	24 Dokumen	24 Dokumen	215.105.880	528 Dokumen	236.616.468	528 Dokumen	272.108.938	528 Dokumen	307.601.408	528 Dokumen	343.093.878	528 Dokumen	343.093.878	
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				248.622.570		261.053.699		300.211.754		339.369.809		378.527.864		378.527.864	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	4 Laporan	248.622.570	4 Laporan	261.053.699	4 Laporan	300.211.754	4 Laporan	339.369.809	4 Laporan	378.527.864	4 Laporan	378.527.864	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				401.201.955		421.262.053		441.262.053		462.662.000		487.670.000		487.670.000	
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	401.201.955	1 Dokumen	421.262.053	1 Dokumen	441.262.053	1 Dokumen	462.662.000	1 Dokumen	487.670.000	1 Dokumen	487.670.000	
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	
5.02.02.2.03.0011 -Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				277.200.000		291.060.000		291.060.000		291.060.000		291.060.000		291.060.000	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	-	88 Orang	277.200.000	88 Orang	291.060.000	88 Orang	291.060.000	88 Orang	291.060.000	88 Orang	291.060.000	88 Orang	291.060.000	
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	281.048.830.321	100%	310.882.708.664	100%	328.128.033.687	100%	338.288.980.820	100%	342.412.887.863	100%	342.412.887.863	
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	4 Laporan	3 Laporan	281.048.830.321	3 Laporan	310.882.708.664	3 Laporan	328.128.033.687	3 Laporan	338.288.980.820	3 Laporan	342.412.887.863	4 Laporan	342.412.887.863	
	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	4 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				269.926.085.966		294.859.962.199		314.003.289.232		325.146.616.265		330.289.943.298		330.289.943.298	
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	4 Laporan	3 Laporan	269.926.085.966,00	3 Laporan	294.859.962.199	3 Laporan	314.003.289.232	3 Laporan	325.146.616.265	3 Laporan	330.289.943.298	4 Laporan	330.289.943.298	
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5.000.000.000,00		9.000.000.000,00		8.000.000.000,00		6.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	-	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	9.000.000.000	1 Laporan	8.000.000.000	1 Laporan	6.000.000.000	1 Laporan	5.000.000.000	1 Laporan	5.000.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota				6.122.744.355		7.122.744.355		7.122.744.355		7.122.744.355		7.122.744.355		7.122.744.355	
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	4 Laporan	1 Laporan	6.122.744.355	1 Laporan	7.122.744.355	1 Laporan	7.122.744.355	1 Laporan	7.122.744.355	1 Laporan	7.122.744.355	1 Laporan	7.122.744.355	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.943.372.888		2.638.867.600		2.887.100.000		2.880.700.000		2.881.100.000		2.881.100.000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	100%	100%	1.943.372.888	100%	2.638.867.600	100%	2.887.100.000	100%	2.880.700.000	100%	2.881.100.000	100%	2.881.100.000	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	100%	1.943.372.888	100%	2.638.867.600	100%	2.887.100.000	100%	2.880.700.000	100%	2.881.100.000	100%	2.881.100.000	
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.943.372.888	2 Dokumen	2.638.867.600	2 Dokumen	2.887.100.000	2 Dokumen	2.880.700.000	2 Dokumen	2.881.100.000	2 Dokumen	2.881.100.000	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen				
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	44 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan				
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	1 Laporan		-		-		1 Laporan		1 Laporan				
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan				
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	1 Laporan	1 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan				
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	6 Dokumen	6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				123.060.000		226.000.000		237.300.000		249.200.000		261.700.000		261.700.000	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	123.060.000	2 Dokumen	226.000.000	2 Dokumen	237.300.000	2 Dokumen	249.200.000	2 Dokumen	261.700.000	2 Dokumen	261.700.000	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				102.580.000		107.800.000		113.200.000		118.900.000		124.900.000		124.900.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	102.580.000	2 Dokumen	107.800.000	2 Dokumen	113.200.000	2 Dokumen	118.900.000	2 Dokumen	124.900.000	2 Dokumen	124.900.000	
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				220.190.000		231.200.000		242.800.000		255.000.000		267.800.000		267.800.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Indikator Outcome/Output	BaseLine (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	44 Laporan	220.190.000	4 Laporan	231.200.000	4 Laporan	242.800.000	4 Laporan	255.000.000	4 Laporan	267.800.000	4 Laporan	267.800.000	
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				8.760.000	-	-	-	-	-	-		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	1 Laporan	8.760.000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				1.014.312.608		1.509.900.000		1.585.400.000		1.664.700.000		1.748.000.000		1.748.000.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	1.014.312.608	1 Laporan	1.509.900.000	1 Laporan	1.585.400.000	1 Laporan	1.664.700.000	1 Laporan	1.748.000.000	1 Laporan	1.748.000.000	
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				289.930.000		287.307.500		301.700.000		316.800.000		332.700.000		332.700.000	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	289.930.000	2 Laporan	287.307.500	2 Laporan	301.700.000	2 Laporan	316.800.000	2 Laporan	332.700.000	2 Laporan	332.700.000	
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				184.540.000		177.750.000		186.700.000		196.100.000		206.000.000		206.000.000	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	184.540.000	1 Dokumen	177.750.000	1 Dokumen	186.700.000	1 Dokumen	196.100.000	1 Dokumen	206.000.000	1 Dokumen	206.000.000	
JUMLAH				288.722.182.281		335.786.087.808		362.778.102.830		382.788.996.601		387.886.298.226		387.886.298.226	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PRORAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PRORAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Standar Harga	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	

4.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan level secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LNPD/Pemprov/Pemkab/Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kinerja/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan:

- Dokumen RPJMN/D
- Dokumen Renstra
- Kebijakan Umum Instansi
- Dokumen strategis lainnya yang relevan
- Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- Kebutuhan informasi kinerja
- Kebutuhan data statistik
- Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama :

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.

3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

Formulasi setiap Indikator Kinerja Utama dirancang untuk mencerminkan capaian utama yang ingin diwujudkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, baik dari aspek pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerah, yang menjadi inti dari peran strategis instansi ini. Setiap indikator diharapkan mampu memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Penetapan indikator kinerja dilakukan melalui proses kajian mendalam dengan mempertimbangkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*). Formulasi indikator tidak hanya menggambarkan hasil administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan efisiensi fiskal, transparansi anggaran, dan akurasi data aset daerah.

Adapun rumusan formulasi untuk Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penetapan APBD

Formulasi: Sebelum tanggal 30 November n-1

Indikator ini mengukur kedisiplinan pemerintah daerah dalam menyiapkan, membahas, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan penyusunan anggaran—mulai dari penyampaian KUA-PPAS, pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan Perda APBD—terlaksana sesuai jadwal yang diatur dalam perundang-undangan. Pencapaian indikator “tepat waktu” menunjukkan koordinasi efektif antara perangkat daerah dan DPRD, kesiapan dokumen perencanaan, serta manajemen waktu yang baik. Ketepatan penetapan APBD menjadi prasyarat utama agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran tanpa penundaan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi simbol efisiensi dan kedisiplinan fiskal daerah.

2. Ketersediaan Kas/Dana tepat waktu

$$\text{Formulasi: } \frac{\text{Jumlah SPM}}{\text{Jumlah SP2D}} \times 100\%$$

Indikator ini mengukur kemampuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam menyediakan kas daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan oleh seluruh perangkat daerah. Rumus ini membandingkan antara jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan dengan jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berhasil dibayarkan. Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh SPM yang diterbitkan telah dipenuhi tepat waktu oleh kas daerah tanpa penundaan pembayaran. Hal ini menjadi bukti efektivitas pengelolaan arus kas dan perencanaan kebutuhan dana pemerintah daerah. Kinerja ini sangat strategis karena keterlambatan pencairan dana dapat menghambat pelaksanaan program prioritas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, indikator ini mencerminkan kinerja operasional keuangan yang efisien serta pengendalian likuiditas yang optimal.

3. Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD

$$\text{Formulasi: } \frac{\text{Jumlah Lap. keuangan opd terhadap LKD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Indikator ini menggambarkan tingkat kesesuaian atau sinkronisasi laporan keuangan antar-OPD dengan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah (LKD). Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menyampaikan laporan keuangan yang sesuai, lengkap, dan terintegrasi dengan sistem pelaporan daerah. Capaian indikator ini menunjukkan kemampuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap penyusunan laporan keuangan OPD, serta efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Semakin tinggi tingkat sinkronisasi, semakin akurat dan transparan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Indikator ini menjadi cerminan langsung dari kualitas akuntansi pemerintahan dan manajemen pelaporan keuangan yang baik.

4. Persentase hasil sinkronisasi aset OPD terhadap BMD

$$\text{Formulasi: } \frac{\text{Jumlah aset opd yg sinkronisasi dengan BMD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Indikator ini mengukur sejauh mana data aset yang dikelola oleh masing-masing OPD telah tercatat dan diverifikasi secara konsisten dalam sistem Barang Milik Daerah (BMD). Nilai 100% berarti seluruh aset telah sinkron antara data di level OPD dan data induk BMD yang dikelola oleh BKAD.

Capaian penuh pada indikator ini menunjukkan keberhasilan BKAD dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan aset, memperkuat sistem inventarisasi, dan mendorong akurasi data aset daerah. Sinkronisasi aset sangat penting untuk mendukung penyusunan neraca pemerintah daerah yang wajar, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah. Indikator ini sekaligus menggambarkan kontribusi BKAD terhadap terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Uraian/Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Ketepatan waktu penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2	Ketersediaan Kas/ Dana tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase hasil sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase hasil sinkronisasi aset OPD terhadap BMD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai AKIP OPD	Nilai	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	
6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82 (B)	83 (B)	84 (B)	85 (B)	86 (B)	87 (B)	

B. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang merepresentasikan kinerja pemerintah daerah.

Langkah-langkah Penyusunan Indikator Kinerja Kunci:

1. IKK harus dirumuskan dengan jelas dan terukur, serta relevan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
2. IKK harus dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif
3. IKK harus selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD
4. IKK juga harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja kunci pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Uraian/Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PENUNJANG URUSAN								
	KEUANGAN								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase	7,6%	7,4%	7,2%	7,0%	6,8%	6,6%	
3	Persentase belanja pendidikan	Persentase	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	
4	Persentase belanja kesehatan	Persentase	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	
5	Persentase belanja infrastruktur (pelayanan publik)	Persentase	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
6	Penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	ASET								
1	Persentase Sertifikasi Aset Tanah Milik Daerah	Persentase	90%	91%	92%	93%	94%	95%	
2	Persentase Aset yang Tercatat dan Terdata dalam SIMDA BMD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penyelesaian kasus tanah Negara (Pemerintah daerah)	Persentase	90%	91%	92%	93%	94%	95%	

4.4. PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan. Pemberian dana penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi perusahaan daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah dalam keuangan daerah. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam APBD dan dibuatkan perda tersendiri untuk mengaturnya. Pemerintah Daerah memberikan dana penyertaan modal harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan daerah itu sendiri sehingga dibutuhkan kajian perhitungan nominal dana penyertaan modal.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:

- a. sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. pendapatan masyarakat; dan
- d. penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Modal dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu tertentu untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk permintaan (kebutuhan) yang penting. Untuk itu pemerintah memiliki peran sebagai agen pendorong aktif dalam kapasitas sebagai penyelamat (pemberian bantuan keuangan) ataupun pengusaha (mengelola badan usaha tertentu), serta berperan pula sebagai pengontrol atau pengarah dalam kegiatan ekonomi tertentu.

Untuk lima tahun ke depan Penyertaan modal Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat kepada BUMD tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Proyeksi Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

NO	NAMA BUMD	MODAL DASAR DITETAPKAN	MODAL SUDAH DISETOR	KEKURANGAN PENYERTAAN MODAL	PROYEKSI RENSTRA/TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI	114.000.000.000,00	64.121.000.000,00	49.879.000.000,00	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.879.000.000,00	
JUMLAH					-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.879.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 disusun guna sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan BKAD berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra BKAD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2025-2029, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten Tanjung Jabung Barat.